

Good Governance, Gusjigang dan Kebijakan Ekologi di Kabupaten Kudus

Mohammad Nur Rofiq Addiansyah^{a,1*}

^a Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

¹ mnurrofiq@iainkudus.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Agustus 2022;

Revised: 5 September 2022;

Accepted: 1 Desember 2022.

Kata-kata kunci:

Good Governance;

Gusjigang;

Kebijakan Ekologi.

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menunjukkan relasi antara kearifan lokal, *good governance* serta kebijakan ekologi yang memiliki keterkaitan erat. Tulisan ini mengambil posisi *good governance* sebagai ide yang berasal dari luar, ternyata mampu kita kolaborasikan dengan gusjigang yang notabnya merupakan kearifan lokal. Kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini melatar belakangi riset ini. Hasil dari riset ini menunjukkan jika nilai-nilai gusjigang yakni wajah dan akhlak yang bagus, kepandaian dalam mengaji, serta kemampuan dalam berdagang bila diintegrasikan secara maksimal maka akan mampu mempengaruhi kebijakan publik, khususnya kebijakan ekologi. Di Kabupaten Kudus sendiri Kebijakan ekologinya sendiri cukup bagus, misalnya saja kebijakan pelarangan penggunaan plastik dan kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau, dua kebijakan ini mampu menginternalisasi nilai-nilai dari gusjigang serta prinsip *good governance*. kebijakan Metode penelitian yang kami gunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data primer kita lakukan dengan wawancara adapun data skunder kita kumpulkan dari berbagai literatur jurnal, buku, dan publikasi media.

ABSTRACT

Good Governance, Gusjigang and Ecological Policy in Kudus Regency. This paper wants to show the relationship between local wisdom, good governance and ecological policies which are closely related. This paper takes the position of good governance as an idea that comes from outside, in fact we can collaborate with gusjigang which incidentally is local wisdom. Conditions of environmental damage that occurred recently became the background of this research. The results of this research indicate that the gusjigang values, namely good looks and morals, intelligence in reciting the Koran, and ability to trade, when integrated optimally, will be able to influence public policy, especially ecological policy. In Kudus Regency, the ecological policies themselves are quite good, for example, the policy for banning the use of plastics and the policy for building green open spaces, these two policies are able to internalize the values of gusjigang and the principles of good governance. policy The research method that we use in this research is a qualitative method with a case study type. We collect primary data by means of interviews, while we collect secondary data from various literature, journals, books, and media publications.

Keywords:

Good Governance;

Gusjigang;

Ecological Policy.

Copyright © 2022 (Mohammad Nur Rofiq Addiansyah). All Right Reserved

How to Cite : Addiansyah, M. N. R. (2022). Good Governance, Gusjigang dan Kebijakan Ekologi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 140-150. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7419>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Kerusakan lingkungan ini terjadi baik di darat, laut maupun udara. Kesuksesan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi seringkali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Data dari Environmental Performance Index (EPI) Tahun 2022 misalnya, kualitas lingkungan di Indonesia berada di posisi 164 dari 180 negara yang di surve (Environmental, 2022). Kondisi ini tentu saja menunjukkan rasa pesimis akan terwujudnya salah satu tujuan sustainable development yakni tentang terwujudnya pemukiman inklusif, tahan lama, aman dan berkelanjutan dimana salah satu indikator yang digunakan yakni memberikan perhatian penting terhadap keseimbangan lingkungan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya (Saraswati & Siagian, 2020).

Kita perlu kembali pada kearifan lokal sebagai alternatif untuk mengembalikan kepedulian kita dan juga kepedulian pemerintah akan arti penting menjaga lingkungan, khususnya tentang bagaimana membangun kembali nilai-nilai kearifan lokal yang menyiratkan makna tentang bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan alam (Gorda & Anggria Wardani, 2020). Kearifan lokal menjadi kekayaan luar biasa bangsa Indonesia bilamana kita mampu terus menggali dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun kebijakan ekologi. Walau kadang banyak yang menganggap kuno, tertinggal zaman, tidak kekinian, tetapi sejatinya kearifan lokal merupakan salah satu cara terbaik dalam memelihara lingkungan di era post-modern (Indrawardana, 2013).

Gusjigang merupakan salah satu kearifan lokal yang diwariskan Sunan Kudus dan masih terus bertahan sampai sekarang. Gusjigang mengandung spirit yang terus dipertahankan masyarakat Kudus yakni bagus (Gus), pandai mengaji (Ji) serta pandai bedagang (Gang). Pesan-pesan ini diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kudus dengan harapan agar masyarakat Kudus senantiasa memiliki akhlak yang bagus, pandai ilmu pengetahuan serta mahir berdagang. Nilai-nilai yang ada pada Gusjigang merupakan fakta konkrit dari sebuah gagasan bahwa Gusjigang merupakan kearifan lokal sekaligus modal social yang dimiliki masyarakat Kudus (Said, 2016).

Melacak tulisan-tulisan tentang Gusjigang, sebenarnya telah banyak tulisan yang mengkaji tentang kearifan lokal ini. Misalnya tulisan-tulisan tentang Gusjigang dan relevansinya dengan ekonomi, bisnis maupun entrepreneurship (Said, 2014), (Bahruddin, 2015), (Rondli, 2019), (Dwi et al., 2020), (Salma, 2022)). Tulisan ini lebih cenderung membahas tentang nilai-nilai Gusjigang yang lebih banyak dimanfaatkan menjadi spirit bisnis atau usaha, dan belum menjangkau terkait kebijakan pemerintah. Gusjigang dalam hal metode pembelajaran ataupun pendidikan karakter juga sudah banyak yang menulis ((Marliati et al., 2016), (Abid, 2017), (Ihsan, 2018), (Sekarini, 2019), (Ghofur et al., 2019), (Sekarini, 2019)), Gusjigang sebagai nilai-nilai yang digali dalam hal untuk konseling atau diterapkan seorang konselor ((Sunarti & Habsy, 2018a), (Sunarti & Habsy, 2018b)). Setelah kami lacak, literatur-literatur diatas, belum ada tulisan yang secara tegas mengaitkan antara Gusjigang dengan good governance maupun kebijakan ekologi. Rata-rata semua penulis lebih menitik beratkan pada nilai-nilai gusjigang sebagai spirit pendidikan artau ekonomi dan belum ada satupun yang menjangkau tentang kaitan antara kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dengan spirit Gusjigang.

Kajian tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebenarnya sudah banyak yang mengkaji. Misalnya kajian yang ditulis oleh Pomeranz dan Stedman, ia mengungkapkan bahwa kajian pemerintahan yang baik setidaknya memuat delapan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: inklusivitas, kinerja, keadilan, kemampuan, transparansi,

akuntabilitas, legitimasi, dan arahan (Pomeranz & Stedman, 2020). Kajian yang lain misalnya menuturkan bila selama ini banyak negara-negara yang menganggap remeh terkait good governance, padahal bila diterapkan lebih jeli dengan memperhatikan keberadaan pemimpin dan kepemimpinan ala Jawa maka hasilnya akan memunculkan kombinasi yang unik dan lebih bermanfaat (Susiatiningsih et al., 2021). Akan tetapi setelah melacak lebih jauh terkait tulisan-tulisan yang mengungkapkan relasi antara kearifan lokal dengan *good governance*, maka literasi itu sangat terbatas.

Ada beberapa argumentasi mengapa penulis mengelaborasi antara *good governance* dengan kearifan lokal, khususnya gusji gang. Argumentasi itu Pertama, *good governance* yang lahir dari luar memberikan indikator-indikator yang tidak terlalu kaku dan masih bisa kita kombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kedua, bila *good governance* tersebut mampu kita kolaborasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, maka bukan hal mustahil bila berbagai inovasi dan kebijakan yang lebih bagus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tulisan ini akan mengungkap lebih dalam terkait bagaimana relasi antara *good governance* dengan gusjigang. Lebih lanjut tulisan ini ingin menunjukkan kepada pembaca terkait sejauh mana nilai-nilai Gusjigang serta prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam berbagai kebijakan ekologi di Kabupaten Kudus.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini berangkat dari adanya berbagai kebijakan ekologi dan spirit gusjigang ditemukan di lapangan, lalu peneliti mengembangkan secara mendalam, dan mengumpulkan literatur secara menyeluruh. Metode kualitatif ini dipilih karena mampu mendialogkan beragam kasus dan fenomena dengan berbagai kondisi. Untuk tipe penelitian yang digunakan yakni metode studi kasus. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena riset dapat kita lakukan lebih mendalam, kasus lebih menarik dan juga kaya akan data. Penelitian ini berbasis pada data primer maupun data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara pada beberapa narasumber yang dianggap relevan, Adapun data sekunder kami dapatkan dari berbagai sumber literasi seperti jurnal, buku dan berita *on line*. Jurnal ini kami pilih karena sifatnya yang sangat *up to date* dalam merespon isu-isu lingkungan setiap hari. Jurnal tersebut melihat multiperspektif. Untuk mengaskes jurnal digunakan kata kunci seperti gusjigang, lingkungan hidup, Kudus. Teknik analisis data yang dilakukan, diawali dari proses reduksi data, kemudian berlanjut pada display data dan diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan ekologi merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait ekologi atau lingkungan. Adapun makna kebijakan publik sendiri bisa kita maknai secara umum yakni tahapan-tahapan perumusan masalah-masalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan (Suuib, 2016). Kebijakan Ekologi atau *Environmental Policy* ini juga menyangkut *environmental governance*, yakni interaksi antar lembaga swasta dengan publik atau antar negara dengan aktor-aktor lintas negara (Ulum, M. Chazainul, 2017).

Terkait kebijakan ekologi di Kabupaten Kudus dapat kita maknai sebagai proses atau tahapan dalam perwujudan kebijakan-kebijakan ekologi (Hao et al., 2019). Akan tetapi dalam paper ini, kami tidak akan membahas proses untuk merumuskan kebijakan tersebut, tetapi lebih fokus pada bagaimana keterkaitannya antara kebijakan ekologi dengan prinsip-prinsip

good governance maupun nilai-nilai gusjigang. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis kebijakan ekologi apa yang telah hadir di Kabupaten Kudus, maka akan kami bahas satu persatu.

Pertama, kebijakan pelarangan penggunaan plastik. Kebijakan pelarangan penggunaan plastik ini dimuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus dan telah di laksanakan di Kabupaten Kudus, yakni Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 66 Tahun 2019. Adapun kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di Kudus ini mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2019 (Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Kudus, 2019). Komitmen pelarangan penggunaan plastik di Kabupaten Kudus ini berlaku semenjak Kudus dipimpin Bupati Tamzil, menurutnya Kabupaten Kudus harus bebas dari sampah plastik pada Tahun 2030. Minimarket dan swalayan di Kabupaten Kudus pun merespon positif adanya kebijakan ini, hingga saat ini kostumer yang biasa belanja dengan plastik dialihkan dengan tas yang lain yang praktis dan bisa dipakai berkali-kali. Hal seperti ini berlangsung hingga hari ini, saat kita berbelanja di mall atau swalayan maka kita tidak akan menemui plastik (Kudus, 2019).

Kedua, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau. Semenjak kepemimpinan Bupati Mustofa yang kedua yakni Tahun 2013-2018, berbagai taman dan ruang terbuka hijau mulai dibangun. Antara lain taman-taman yang dibangun tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pembangunan Taman Ganesha. Taman Ganesha merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Taman Ganesha berada diantara pusat lembaga pendidikan, pemerintahan dan juga bisnis.. Taman Ganesha ini sendiri posisinya berada didepan persis SMA N 2 Kudus, serta relatif dekat dengan SMK N 1 Kudus dan juga Universitas Muhammadiyah Kudus. Taman ini tertata cantik di lahan yang sebelumnya terbengkalai. Sekarang berbagai tanaman bunga dan juga tumbuh-tumbuhan yang dilengkapi berbagai kursi duduk tampak rapi dan selalu ramai. Kedua, pembangunan Taman Wergu. Taman Wergu merupakan salah satu taman yang ada di Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Taman ini dibuka setiap hari dan paling ramai di kunjungi saat akhir pekan, Hari Sabtu atau minggu. Taman ini berisi puluhan tanaman yang sudah tertata rapi. Aneka permainan anak seperti air mancur, plorotan, ayunan dan lain-lain tersedia di taman ini. Di dekat taman wergu juga ada Taman Krida yang didalamnya tersedia kolam renang (Erawisata.com, 2022).

Ketiga yakni Taman Krida. Taman ini masih jadi satu dengan taman wergu dan hanya bersebalahan. Taman Krida ini menyediakan berbagai fasilitas untuk publik diantaranya fasilitas olah raga jogging dan kolam renang, arena balap sepeda anak-anak dan arena bermain keluarga yang menyenangkan. Taman yang dilengkapi berbagai fasilitas keluarga ini ramai dikunjungi masyarakat Kudus, Demak, Pati, Jepara setiap akhir pekan.

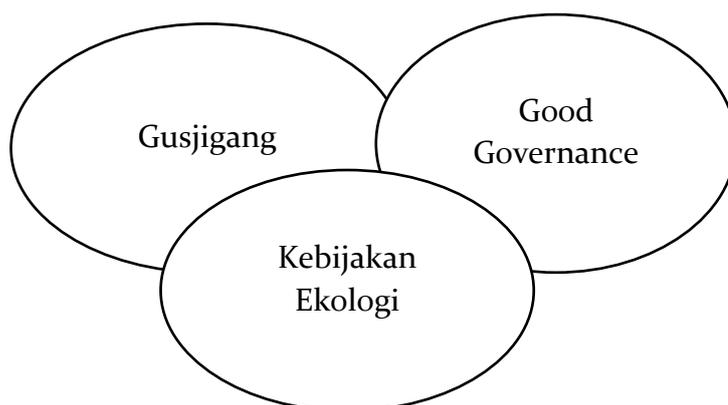
Keempat, Taman Gondang Manis. Taman Gondang Manis merupakan taman indah yang berlokasi di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Lokasinya yang sejuk dekat dengan berbagai fasilitas pendidikan seperti Universitas Muria Kudus, IAIN Kudus, SMP N 2 dan 3 Bae, SMA N 2 Bae menjadikan taman ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan taman ini juga ramai hingga malam hari tiba. Kelima, Taman Bale Jagong. Bale Jagong merupakan kawasan olah raga terpadu dalam satu lokasi. Disini terdapat berbagai venue olah raga tenis, tenis meja, lari, sepeda, sepatu roda, badminton, panjat tebing, menembak, panahan, erobik dan sebagainya. Masyarakat segala usia sering memadati taman ini khususnya saat sore hari atau akhir pekan. Selain menjadi pusat olah raga, disini juga terdapat banyak PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menjual berbagai jajanan atau cemilan. Pedagang di Taman Balai

Jagong mencapai 200an pedagang saat Hari Minggu. Para pedagang di Bale Jagong dikoordinasi oleh salah seorang penjual yang bertindak sebagai ketua.

Berikutnya peneliti akan membincang terkait relasi *good governance* dan gusjigang sebagai sebuah *frame work* untuk kebijakan ekologi. Membaca relasi antara Gusjigang dengan *good governance* tidaklah langsung bisa kita analisis tanpa kita melihat lebih jauh tentang apa itu *local wisdom* atau kearifan lokal. Keterkaitan erat ini bisa kita maknai bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai alternatif dalam penguatan *good governance* (Marpaung, 2013), (Rahmatiani, 2016). Sebagai salah satu kearifan lokal khas Indonesia dan yang utama di Kabupaten Kudus, Gusjigang dengan tiga nilai utama yakni pintar mengaji, pandai pedagang dan juga memiliki aklak yang bagus juga memiliki relasi yang erat dengan *good governance*. Nilai-nilai ini, bila peneliti jabarkan lebih lanjut akan terlihat kaitan yang erat.

Pertama, nilai *Gus* yang berarti Bagus atau memiliki tampang yang rupawan serta akhlak yang menawan (Bahrudin, 2015), *Gus* juga dapat dimaknai sebagai sosok yang bijak dalam menentukan keputusan (Said, 2014). *Gus* dari unsur gusjigang merupakan salah satu unsur budaya yang dapat dijadikan sumber pengetahuan. *Gus* sebagai unsur gusjigang juga berisi nilai, praktik, dan norma yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa, simbol ideologi dalam lembaga. Unsur *Gus* juga dapat kita Tarik dalam nilai dan praktik dalam *good governance* yakni: transparan, akuntabilitas, dan keterbukaan baik.

Kedua, yakni *Ji* yang berarti pintar ngaji. Pintar mengaji ini dapat dimaknai dalam arti sempit yakni masyarakat Kudus diharapkan pandai mengaji. Sedangkan dalam arti luas dapat ditarik makna bahwa spirit *Ji* pada *Gusjigang* yakni mendorong masyarakat Kudus untuk semakin pintar, cerdas, memiliki literasi yang kuat dan bijak. Budaya dalam Gusjigang dapat menjadi stimulan dalam memunculkan pengetahuan untuk menciptakan value dan berdagang, dimana budaya Gusjigang ini membentuk dan meningkatkan sumber-sumber intelektual lembaga. Etika Islam yang ada dalam Budaya Gusjigang mendorong tata kelola yang baik sehingga bisa kita kaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*, spirit *Ji* pada *Gusjigang* ini sangat erat kaitannya dengan profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum dan juga orientasi konsensus (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009)



Gambar 1. Relasi Kearifan Lokal, Good Governance dan Kebijakan Ekologi

Ketiga, *Gang* yang mengandung spirit agar masyarakat Kudus bisa tetap mandiri dalam hidup. Untuk bisa mandiri tersebut salah satu prinsip yang bisa digunakan adalah dengan berdagang. Makna berdagang ini kemudian meluas hingga berwirausaha (Dwi et al., 2020). Berkaitan dengan berdagang ini, hingga saat ini Kabupaten Kudus sendiri merupakan kota pusat industri dan perdagangan. Sudah ratusan tahun lalu Kudus berkembang sebagai Kota Kretek, selain itu adanya Pasar Kliwon serta ratusan pabrik yang hadir di Kudus menyiratkan

pesan jika prinsip Gang di Kudus ini masih terus dihidupkan. Bila kita kaitkan dengan *good governance*, maka ada prinsip-prinsip yang terkait erat, antara lain: kesetaraan, partisipasi dan kompetensi (Ambarriani, 2020), dimana dalam aktivitas perdagangan, adanya kesetaraan informasi antara penjual dan pembeli, bagaimana interaksi kedua aktor yang partisipatif dan kompeten benar-benar sangat riil dibutuhkan.

Tabel 1: Relasi Gusjigang dan Good Governance

Nilai-Nilai <i>Gus Ji Gang</i>	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>
<i>Gus</i>	Transparan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas
<i>Ji</i>	Efektivitas Efisiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus
<i>Gang</i>	Kesetaraan Kompetensi Partisipasi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berikutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi *Gus Ji Gang* dan *Good Governance*: yang mampu menginspirasi kebijakan ekologi. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait bagaimana relasi antara *good governance* dengan *gusjigang*, maka kini kita lanjutkan dengan pembahasan terkait bagaimana relasi antara *good governance*, *gusjigang* dengan kebijakan ekologi yang ada di Kabupaten Kudus. Kebijakan disini yang kita diskusikan bukan tahapan-tahapan dalam proses formulasi kebijakan secara detail, akan tetapi lebih kita gali pada aspek bagaimana nilai-nilai *gusjigang* serta prinsip-prinsip *good governance* tersebut mampu kita infiltrasi pada masing-masing kebijakan.

Pertama, kebijakan pelarangan penggunaan plastic bagi seluruh toko, swalayan dan minimarket di Kabupaten Kudus. Pada kebijakan ini, semua nilai-nilai *gusjigang* serta semua prinsip-prinsip *good governance* bisa kita terapkan. Misalnya nilai *Gang*, disini tentu saja terkait erat dengan prinsip bahwa Sunan Kudus memberi pesan pesan agar masyarakat Kudus gemar berdagang. Dalam berdagang ini tentu saja sesuai dengan prinsip *good governance* yang terkait yakni adanya kesetaraan informasi antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan pelarangan penggunaan plastik ini, partisipasi aktif masyarakat baik pedagang maupun pembeli sangat dibutuhkan. Hal ini bisa kita tangkap saat kita melakukan wawancara dengan salah satu penjaga swalayan:

“Terkait dengan kebijakan pelarangan plastik, menurut saya pemerintah sudah memberi informasi dan sosialisasi jauh-jauh hari. Perusahaanpun merespon positif. Kami menyediakan tas kain yang relatif murah. Alternatif lain, kita ingatkan masyarakat untuk membawa kantong sendiri atau tas dari rumah. Awalnya kita mengingatkan terus-menerus, akhirnya masyarakat paham sendiri.” (Wawancara dengan Yuli Pegawai Indomaret, 2022).

Pernyataan Yuli, pegawai Indomaret ini diperkuat oleh Bapak Urip, selaku pegawai PKPLH Kabupaten Kudus. Beliau mengungkapkan bila sosialisasi dan pemberian informasi tentang pelarangan plastik sudah dilakukan jauh-jauh hari.

“Kami melakukan sosialisasi tentang pelepasan penggunaan plastic ini jauh-jauh hari. Masyarakat boleh jualan, boleh berdagang tapi mohon untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Kami menyiarkan ini diberbagai media, baik itu media sosial, media cetak maupun media elektronik seperti radio. Awalnya sosialisasi ini kita ulang berkali-kali, tapi sekarang, masyarakat sudah sadar.” (Urip PKPLH, 2022).

Tabel 2: Relasi Gusjigang, Good Governance dan Kebijakan Ekologi

No.	Kebijakan Ekologi	Nilai-Nilai Gusjigang	Prinsip-Prinsip Good Governance
1.	Kebijakan Pelarangan Plastik	Gus, Ji, Gang	Trannspan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Efektivitas Efisiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus Kesetaraan Kompetensi Partiipasi
2.	Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Gus, Ji	Trannspan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Efektivitas Efisiensi Orientasi Konsensus
3.	Kebijakan Pengelolaan Sampah	Gang	Kesetaraan Kompetensi Partisipasi
4.	Pembangunan City Walk Jalan Sunan Kudus	Gus, Gang	Trannspan Akuntabilitas Keterbukaan Profesionalitas Kesetaraan Kompetensi Partisipasi
5.	Pembangun Waduk Logung	Ji, Gang	Efektivitas Efisiensi Kepastian Hukum Orientasi Konsensus Kesetaraan Kompetensi Partisipasi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Kedua, Kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau. Kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan prinsip Gus, dalam artian memiliki akhlak yang bagus serta Ji dalam arti kepandaian dan kecakapan yang mumpuni. Pada prinsip-prinsi *good governance* tentu saja sangat berkaitan erat dengan keterbukaan, dalam artian proses kebijakan ini karena melibatkan multiaktor, maka harus benar-benar terbuka. Profesionalitas, bagaimana pengelola kebijakan

ini dari level atas hingga level bawah seperti tukang sapu dan penjaga taman harus benar-benar profesional. Orientasi konsensus, bagaimana prinsip-prinsip keterbukaan serta kesepakatan dibuat harus benar-benar demokratis untuk meminimalisir konflik.

“Selama saya menjadi tukang sapu disini, pimpinan selalu mengontrol rutin. Awalnya saya dulu saya di Taman Ganesha, lalu 2019 saya dipindah di Taman Gondangmanis. Meskipun kita hanya tukang sapu, tapi kita juga selalu tetap disiplin dan profesional.” (Solihin, 2022).

Ketiga, Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus relatif bagus. Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pemerintah desa serta seluruh pemangku kepentingan membangun sinergisitas dalam pengelolaan sampah (Pratama et al., 2018), (Ramadan et al., 2019). Bila kita dalam lebih jauh terkait pengelolaan sampah di Kudus ini, kita bisa menggali dengan nilai-nilai gusjigang Gang serta prinsip good governance yakni kesetaraan, kompetensi dan partisipasi. Kesetaraan dapat kita lihat saat Pemerintah Kabupaten Kudus membuka ruang seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengembangkan pola-pola pengelolaan sampah. Misalnya, salah satu bank sampah di Kudus yang sukses mengembangkan pengelolaan sampah ini ada di Desa Bae dan Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Bank Sampah di Desa Bae yang bernama Tanjung Seto sudah sangat nyata prestasinya. Bahkan saat lomba desa unggulan, bank sampah ini menjadi satu hal yang ditonjolkan. Produk bank sampah ini pun mampu mengolah sampah organik menjadi berbagai produk peternakan dan pertanian, semisal pupuk kompos dan pakan ternak (<https://ppid.kuduskab.go.id/>, 2022).

Untuk menginfiltirasi nilai-nilai gusjigang serta good governance dalam berbagai kebijakan ekologi di Kabupaten Kudus kita dapat melakukan dengan beberapa hal, diantaranya: Pertama, memetakan aktor dan memperkuat kolaborasi. Pemetaan aktor ini juga penting bila kita mampu melanjutkan dengan komunikasi intensif khususnya terkait *good governance* dan kearifan lokal (Onu, 2011), (“Good Governance and Strategic Communication: A Communication Capital Approach,” 2020). Kedua, menintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip good governance dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Kudus.

Prinsip good governance yang lain yang sangat dibutuhkan yakni adalah kompetensi, yakni kompetensi komprehensif yang harus benar-benar dilakukan oleh pengelola sampah. Juga partisipasi masyarakat Kudus yang harus aktif terhadap program-program inovatif pemerintah daerah.

Keempat, pembangunan city walk Jalan Sunan Kudus. Jalan Sunan Kudus sepanjang 2 kilo meter kearah barat dari alun-alun Kudus seolah menjadi icon baru di Kabupaten Kudus. Prinsip good governance yang paling menonjol dari proyek ini antara lain akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, serta partisipasi. Pada aspek partisipasi bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah membangun komunikasi dengan seluruh PKL yang terlibat menjadi tantangan tersendiri. Kelima, pembangunan waduk logung. Waduk Logung merupakan waduk buatan yang dibangun sejak Tahun 2014 dan berakhir di Tahun 2022. Fungsi waduk ini antara lain sebagai daerah resapan dan suply air untuk wikayah Muria. Pembangunan Waduk dengan luas genangan 144, 06 hektar ini tentu saja juga menggunakan prinsip-prinsip *good governance* khususnya kepastian hukum dan konsensus bersama

Penguatan kolaborasi ini bisa kita awali dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat. Misal: Pemerintah Kabupaten Kudus, Yayasan Masjid Menara, perusahaan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Komunikasi intensif antar aktor serta proses menghimpun beragam gagasan menjadi sesuatu yang mutlak dapat dilakukan agar nilai-nilai gusjigang dan prinsip-prinsip good governance tetap hidup. Mengintegrasikan nilai-nilai

gusjigang serta prinsip *good governance* lebih mudah dilakukan. Dengan muatan-muatan seperti ini maka sikap anak-anak untuk cinta lingkungan disertai dengan nilai-nilai gusjigang serta prinsip-prinsip *good governance* bisa terwujud.

Simpulan

Temuan terpenting dalam riset ini adalah ternyata kearifan lokal memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *good governance* yang notabenehnya merupakan gagasan dari luar. Tulisan ini menunjukkan bahwa gusjigang yang merupakan kearifan lokal yang khas di Kudus ternyata mampu peneliti kolaborasikan dengan *good governance*. Nilai-nilai gusjigang dan spirit pada prinsip-prinsip *good governance* bila kita kawinkan maka akan menghasilkan kebijakan publik yang bagus, dimana dalam riset ini yang peneliti jadikan bijakan adalah kebijakan ekologi. Riset ini mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya terkait keterkaitan erat antara kearifan lokal dengan *good governance*. Tulisan ini juga memberi perspektif baru dalam membaca gusjigang, dimana nilai-nilai kekhasan yang ada pada kearifan lokal ini tidak hanya bisa kita manfaatkan dalam ruang pendidikan, tetapi lebih jauh bisa peneliti kolaborasikan dalam kebijakan pemerintahan.

Referensi

- Abid, N. (2017). Mengintegrasikan Kearifan Lokal Gusjigang dan Nilai-Nilai Soft Skill dalam Proses Pembelajaran. *Elementary*.
- Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate Governance: An International Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00737.x>
- Ambarriani, A. S. (2020). Implementation of Good Governance in Indonesia's Village Fund Program (Program Dana Desa) to Accelerate Community Welfare: A Case Study in Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Province. *International Journal of Innovation, Management and Technology*. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2020.11.4.888>
- Bahrudin, A. (2015). Spirit Gusjigang Kudus Dan Tantangan Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Penelitian*. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.848>
- Dwi, S., Rahmawati, Djuminah, & Falikhatun. (2020). Business sustainability antecedents in creative industry: A qualitative research study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Erawisata.com. (2022). 15 Taman Hiburan di Kudus asik buat bermain sekaligus Refresing. *Erawisata.Com*, 1.
- Ghofur, A., Miftakhurozaq, M., & Maryanto, H. (2019). In Forming Religious Behavior and Entrepreneurship. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v4i2.2183>
- Good Governance and Strategic Communication: A Communication Capital Approach. (2020). In *The Routledge Handbook of Strategic Communication*. <https://doi.org/10.4324/9780203094440-21>
- Gorda, A. N. E. S., & Anggria Wardani, D. K. (2020). Refleksi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Bali Dalam Pengelolaan Lingkungan. *ETTISAL: Journal of Communication*. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>
- Hao, Y., Yang, D., Yin, J., Chen, X., Bao, A., Wu, M., & Zhang, X. (2019). The effects of ecological policy of Kyrgyzstan based on data envelope analysis. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su11071922>
- Ihsan, M. (2018). Gusjigang; Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi. *IQTISHADIA*. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2862>
- Indrawardana, I. (2013). Kearifan lokal adat masyarakat sunda dalam hubungan dengan lingkungan alam. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i1.2390>
- Marliati, N., Widowati, T., & Kuswardinah, A. (2016). Pengembangan Modul Hairpiece Untuk

- Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Paket Keahlian Tata Kecantikan Rambut. *Journal of Educational Social Studies*.
- Marpaung, L. A. (2013). Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Yustisia Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10204>
- Onu, G. (2011). Information and Communication Technology and Good Governance in Africa. In *Information Communication Technologies*. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-949-6.cho10>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy and Planning*.
<https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181>
- Pratama, A. Y., Rahma, Y., & Normassari, A. (2018). Jasa Pengangkut Sampah (Sangkuts) Berbasis Android Di Kabupaten Kudus. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*. <https://doi.org/10.24176/simet.v9i1.1656>
- Rahmatiani, L. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.36805/civics.viii.30>
- Ramadan, B. S., Safitri, R. P., Cahyo, M. R. D., & Wibowo, Y. G. (2019). Optimasi Sistem Pengangkutan Sampah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. *Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*.
<https://doi.org/10.14710/presipitasi.v16i1.8-15>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kudus, 2019 (2019).
- Rondli, W. S. (2019). Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal GUSJIGANG: Sebagai Alternatif Mulok Untuk Penanaman Karakter Kemandirian Warga Negara. *Proceedings: Penguatan Muatan Lokal Bahasa Daerah Sebagai Pondasi Pendidikan Karakter Generasi Milenial*.
- Said, N. (2014). Spiritual Enterprenership Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syari'Ah Dalam Masyarakat Pesisir. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Said, N. (2016). Filosofi Menara Kudus. Pesan Damai untuk Dunia. In *Filosofi Menara Kudus. Pesan Damai untuk Dunia*.
- Salma, S. N. (2022). Implementasi Nilai Pendidikan Islami melalui Filosofi Gusjigang bagi Masyarakat Kudus Kulon. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*.
<https://doi.org/10.46963/mpgmi.v8i1.442>
- Saraswati, A. R., & Siagian, T. H. (2020). Modeling Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2017: Suatu Upaya Pencapaian SDGS. *Seminar Nasional Official Statistics*.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.213>
- Sekarini, A. P. (2019). Persepsi Peserta Didik Dan Guru Ipa Terhadap Penggunaan Game Edukasi. *Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & Matematika*.
<https://doi.org/10.23971/eds.v7i1.1033>
- Solihin, P. T. G. (2022). Wawancara dengan Solihin Petugas Kebersihan Taman Gondangmanis.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Sunarti, & Habsy, B. A. (2018a). Identifikasi Kepribadian Ideal Konselor Berdasarkan Kajian Hermeneutika Gadamerian Pada Nilai-Nilai Luhur Gus-Ji-gang Sunarti. *Indonesia Journal of Learning Education and Counseling*.
- Sunarti, S., & Habsy, B. A. (2018b). Identifikasi Kepribadian Ideal Konselor Khas Budaya Indonesia : Kajian Nilai-Nilai Luhur Gusjigang Berdasarkan Perspektif Hermeneutika Gadamerian. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*.
<https://doi.org/10.31960/ijolec.viii.21>
- Susiatiningsih, H., Setiyono, B., Puspapertiwi, S., Saputra, J., & Afrizal, T. (2021). A study of good governance innovation of javanese leadership in Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.34>
- Ulum, M. Chazainul, R. N. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola*

Lingkungan Hidup.

Urip PKPLH, K. (2022). *Wawancara dengan Urip Pegawai PKPLH Kabupaten Kudus.*

Wawancara dengan Yuli Pegawai Indomaret. (2022). *Wawancara dengan Pegawai Indomaret.*